

yang dapat muncul di setiap sisi kehidupannya. Dengan demikian security mindedness merupakan suatu ciri adanya daya tangkal dalam masyarakat tersebut. Sampai saat ini kita pun masih merasakan bahwa sikap security mindedness ini belum cukup berkembang, sehingga daya tangkal masyarakat pun masih perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Oleh karena itu kepada para perwira terutama unsur pimpinan Polri di lapis depan saya minta agar dalam menghadapi kondisi seperti ini hendaknya dapat dijadikan sebagai bagian integral dari kiprah operasionalnya dalam membina sistem keamanan swakarsa di daerah. Upaya-upaya menggugah daya lawan masyarakat terhadap gangguan keamanan ini harus dilakukan secara teratur dan terus menerus. Sebagai contoh dalam upaya ini adalah penyelenggaraan apel para kepala pos Kamling yang diadakan secara serentak tanggal 14 Juni 1989 yang lalu adalah merupakan salah satu wujud dari upaya membangkitkan daya lawan masyarakat tersebut.

PENUTUP.

Masalah-masalah yang telah diskripsikan di atas, jelas bukanlah merupakan masalah yang sederhana dalam pemecahannya. Mengamati serta menganalisa berbagai keberhasilan pelaksanaan tugas Polri terutama di lapis depan akhir-akhir ini, adalah dikarenakan upaya-upaya pencegahan yang bersifat strategis dengan dukungan penerapan ilmu dan teknologi kepolisian yang dilandasi oleh ketekunan dan kerelaan berkorban dari segenap petugas pelaksanaannya.

Di samping memiliki wawasan yang luas, maka dengan mengungkapkan materi-materi dalam "Kepemimpinan Lapis Depan Yang Ilmiah dan Amaliah" di atas, juga dimaksudkan agar para perwira Polri terutama yang menduduki posisi sebagai unsur Pimpinan pada lapis depan dan sekaligus berperan sebagai pembantu Pimpinan pada lapis menengah, memiliki kesatuan persamaan persepsi sehingga kemudian diperoleh keseragaman dalam tindakan.

Sekian dan selamat bertugas.

(Disunting: Drs. Muhammad Zein)

DITEKSI DINI DAN POSTURNYA DI MASA DATANG

Oleh : Mayjen. Pol. Drs. Muslihat Wiradiputra, S.H.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang telah dan sedang terlaksana dewasa ini, di samping berdampak positif juga menimbulkan kerawanan-kerawanan, terutama di bidang Kamtibmas, baik berupa faktor-faktor korelatif kriminogen, police hazard maupun ancaman faktual dalam bentuk kriminalitas. Dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategik lainnya, dapat dibayangkan betapa berat dan kompleksnya masalah yang dihadapi Polri di dalam pelaksanaan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum dan sebagai inti pembina Kamtibmas dimasa mendatang.

Di dalam upaya menjamin kewibawaan dan keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut di atas, Pimpinan Polri telah menetapkan beberapa kebijaksanaan, dimana yang terakhir berupa kebijaksanaan Strategi Optimasi dan Dinamisasi yang di dalamnya antara lain mengharapkan agar fungsi Intelijen Kepolisian menjadi "pushing power" bagi fungsi-fungsi Kepolisian lainnya.

Di bidang operasional, salah satu peran Intelijen Kepolisian yang menonjol di dalam organisasi Polri adalah diteksi yang diarahkan untuk menditeksi (menemukan)

hal-hal yang bertalian dengan pelanggaran hukum dan kerawanan-kerawanan Kamtibmas guna selanjutnya diidentifikasi (dikenali) serta dinilai (assesment) sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan.

Petunjuk Kapolri tentang diteksi dini antara lain agar pada tahap pemantapan Strategi Optimasi dan Dinamisasi, diharapkan terciptanya kemampuan diteksi dini dengan profesionalisme intelijen yang tinggi.

Di dalam rangka menyongsong tahap pemantapan Strategi Optimasi dan Dinamisasi Polri tersebut serta selaras dengan upaya yang telah dirintis dan akan terus dipacu guna terus dikembangkan dan dimantapkan oleh penulis di Polda Jateng, maka dipilih judul seperti tersebut di atas, dengan materi pembahasannya mencakup baik Intelijen dalam pengertian organ maupun fungsi, perkembangannya dimasa lalu dan sekarang. posturnya yang diharapkan dimasa datang terutama di dalam upaya diteksi dini dan pengungkapan kerawanan-kerawanan Kamtibmas di dalam rangka menunjang pembangunan Nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Naskah pembahasan materi tersebut, disusun sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Sepintas tentang perkembangan Intelijen Kepolisian RI sebagai fungsi dan organ hingga sekarang
3. Diteksi dini dan fosturnya dimasa datang
4. Upaya peningkatan kemampuan diteksi di Polda Jateng
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi
6. Penutup.

SEPINTAS TENTANG PERKEMBANGAN INTELIJEN KEPOLISIAN RI. SEBAGAI FUNGSI DAN ORGAN HINGGA SEKARANG

1. Periode tahun 1945-1950.

Sebenarnya Intelijen Kepolisian RI sebagai fungsi, ada sejak Kepolisian RI itu sendiri lahir, yaitu pada saat-saat setelah Negara Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945; atau tepatnya pada tanggal 20 September 1945, di mana pada saat itu Bapak R.S. Soekanto ditunjuk/diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI yang pertama.

Pada saat itu memang sebagai organ belum jelas, akan tetapi dapat dipastikan bahwa Bapak R.S. Soekanto selaku pimpinan Kepolisian RI saat itu, tentu tidak akan mengambil suatu keputusan/kebijaksanaan, tanpa sebelumnya dimin-

takan dari para pembantunya data, permasalahan serta penilaiannya atas permasalahan tersebut.

Akan tetapi setelah Jawatan Kepolisian Negara (DKN) dipindahkan kedudukannya dari Jakarta ke Purwokerto, karena situasi di Jakarta yang semakin genting (saat itu bulan Pebruari tahun 1946); fungsi Intelijen Kepolisian telah diwadahi dalam organ yang disebut "Pengawas Aliran Masyarakat" (PAM) yang mempunyai tugas terutama di bidang politik, yang saat itu ber Kantor dengan bagian Reserse di Jalan Stasiun Purwokerto.

2. Periode tahun 1950-1959.

Setelah Kepolisian Negara RI kedudukannya dipindahkan kembali ke Jakarta, fungsi Intelijen Kepolisian RI tidak mengalami perubahan, akan tetapi pada periode itu sebutan dan organnya mengalami perubahan dari Pengawas Aliran Masyarakat menjadi Dinas Pengawas Keselamatan Negara (DPKN).

Kemampuannya saat itu benar-benar dapat diandalkan, DPKN dapat memerankan fungsinya dengan baik; sehingga Intelijen dan kepentingan Negara saat itu benar-benar adalah hasil karya jajaran Intelijen Kepolisian RI (DPKN).

Di dalam bukunya yang berjudul "Perkembangan Kepolisian di Indonesia" M. Oudang menulis tentang DPKN sebagai berikut: "dinas ini melakukan peninjauan masyara-

kat pada umumnya, melaporkan kepada pemerintah hasil-hasil peninjauannya. Titik berat dalam usahanya diletakkan pada pengawasan dan penghalauan kolone ke-5, mencegah c.q. menentang infiltrasi, penetrasi, spionase dan sabotase di lapangan politik, sosial dan ekonomi". Semua menteri dan pejabat-pejabat tinggi negara saat itu ajudannya adalah anggota-anggota DPKN, demikian juga semua petugas sandi di Kedutaan Besar RI di luar negeri adalah anggota-anggota Kepolisian RI dari DPKN. Bapak Oemar Ghatab adalah tokoh legendaris/Bapak dari Intelijen Kepolisian RI, dan hingga saat ini masih tersisa rasa bangga seseorang yang pernah menjadi anggota DPKN di Kepolisian RI.

3. Periode tahun 1959-1965.

Pada periode ini di mana Partai Komunis Indonesia (PKI) telah semakin kuat, setelah pada Pemilu tahun 1955 muncul sebagai salah satu partai besar di Negara RI; segala lapisan masyarakat termasuk Angkatan Bersenjata dan Kepolisian RI menjadi sasaran penetrasi dan pengaruhnya; di dalam usahanya memperlemah Angkatan Bersenjata RI dan menumbuhkan/menimbulkan rivalitas di antara unsur-unsur ABRI, di dalam situasi yang demikian itu, PKI memanfaatkan pula Badan Pusat Intelijen (BPI) yang dipimpin Dr. Subandrio. Dalam periode itu terjadi perubahan organ dalam Intelijen Kepolisian dari

DPKN berubah menjadi Dinas Security dan pelbagai perubahan lainnya, baik fungsi maupun organnya.

4. Periode sejak Orde Baru — hingga sekarang.

Usaha menata kembali Intelijen Kepolisian RI baik sebagai fungsi maupun sebagai organ, dimulai dan dilaksanakan sejalan dengan penataan kembali seluruh unsur-unsur Angkatan Bersenjata RI.

Beberapa ketentuan yang bertalian dengan penataan kembali unsur-unsur ABRI antara lain: Keppres RI Nomor 52/1969 tentang sebutan, kedudukan organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara RI sebagai unsur ABRI di dalam Departemen Hankam; Keppres RI Nomor 79/1969; Keppres RI Nomor 7/1974 yang dijabarkan dengan Keputusan Men Hankam/Pangab Nomor 15/1976. Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, yang bertalian dengan Intelijen Kepolisian dinyatakan bahwa Intelijen Kepolisian sebagai pelaksana kegiatan/operasi Intelijen Kepolisian sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan.

Sebagai organ/wadah, namanya telah dirubah menjadi Pengawas Keselamatan Negara (PKN).

Pada sekitar tahun 1978 musibah menimpa jajaran Kepolisian RI di mana pada saat itu tahun 1979 telah dilakukan berbagai upaya pengembalian/pemulihan citra yang menurun tersebut.

Upaya pengembalian/pemulihan citra tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembenahan di segala bidang di dalam tubuh Kepolisian RI. Khusus bagi fungsi Intelijen pada tahun 1980 di dalam upaya pembenahan tersebut telah diterbitkan naskah "Konsepsi Pembenahan dan Pembangunan Intelijen Kepolisian", di mana saat itu Asisten Intelijen di Markas Besar Polri dijabat oleh Bapak Mayjen. Pol. Drs. Soekartono.

Berbagai aspek dijadikan sasaran di dalam pembenahan dan pembangunan Intelpol; seperti organisasi, personil, materiil dan logistik, HTCK dan lain-lain; baik dalam lingkup jangka pendek, sedang maupun panjang. Yang bertalian dengan fungsi Intelijen Kepolisian di dalam naskah tersebut diuraikan sebagai berikut:

"Fungsi Intelijen Kepolisian adalah segala usaha dan kegiatan di bidang Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan; untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, terutama sebagai penegak hukum dan inti pembina keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk keperluan tugas-tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial".

Selanjutnya yang bertalian dengan fungsi Intelpol dalam naskah tersebut dipertegas sebagai berikut:

"Intelpol sebagai fungsi melingkupi 2 (dua) jalur yaitu:

a. Jalur "inward looking", yaitu se-

bagai penyelenggara fungsi Intelpol dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri.

b. Jalur "outward looking", yaitu dalam rangka pelaksanaan Sistem Intelijen Nasional dan merupakan bagian/unsur dari pada Intelijen Hankam/ABRI.

Mengingat pada saat disusunnya naskah "Konsepsi Pembenahan dan Pembangunan Intelpol" organisasi Polri menganut type Staf Umum, maka yang menyangkut organ antara lain dinyatakan sebagai berikut: "Intelijen sebagai organ dapat kita amati dalam struktur organisasi Polri di mana terdapat jalur Staf dan jalur Operasional/pelaksana".

Saat itu di tingkat Markas Besar Polri ada Staf Intelijen yang dipimpin oleh Asisten Intelijen dan ada Dinas Intelijen yang dipimpin oleh seorang Ka (Kadis), di tingkat Polda oleh Staf Intelijen yang dipimpin oleh Asisten Intelijen dan ada Seksi Intelijen yang dipimpin oleh seorang Ka (Kasi). Selanjutnya sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Hankamneg, yang bertalian dengan Polri dikeluarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1989 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI sebagai pengganti Keputusan Men Hankam/Pangab Nomor: Kep/15/IV/1976 tanggal 13 April 1976.

Dalam pasal 3 ayat a Keputusan Pangab tersebut diuraikan tentang

fungsi Kepolisian yang terdiri atas; fungsi utama, fungsi organik Polri, fungsi organik pembinaan, fungsi khusus dan fungsi teknis. Intelijen dan Pengamanan Kepolisian digolongkan di dalam fungsi utama yang di dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

"Intelijen dan Pengamanan Kepolisian dengan menyelenggarakan diteksi dini, identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum penyimpangan norma sosial lainnya dan sumber gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan faktor kriminogen termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri".

Sementara itu sejalan dengan perubahan organisasi dari type Staf Umum ke type Direktorat; maka di tingkat Markas Besar organ Intelijen adalah Direktorat Intelpampol demikian juga di tingkat Polda, di tingkat Polwil ada Bagian Intelpampol, di tingkat Polwiltabes/Poltabes/Polresta/Polres dibentuk satuan Intelpampol serta di tingkat Polsek/Polsekta dibentuk Unit Res. Intel.

DITEKSI DINI DAN POSTURNYA DIMASA DATANG

Dari uraian di atas, khususnya yang bertalian dengan fungsi Intelpampol, dapat disimpulkan bahwa

salah satu peran Intelpampol yang menonjol di dalam organisasi Polri adalah diteksi.

Oleh karena itu di dalam naskah "Konsepsi Pembenahan dan Pembangunan Intelijen Kepolisian" diuraikan antara lain sebagai berikut: ". . . Samaptapol dan Bimmaspol mengemban tugas-tugas Operasional Kepolisian yang bersifat preventif, Resersepol mengemban tugas Operasional Kepolisian yang bersifat represif dan Intelpampol mengemban tugas diteksi dalam rangka memberi arah baik bagi kegiatan Operasional Polri preventif dan represif maupun dalam rangka kegiatan di bidang pembinaan, di samping juga berperan dalam kegiatan yang bersifat aksi Intelijen lainnya sesuai dengan fungsi-fungsi teknisnya".

Di bidang Operasional diteksi dari Intelijen Kepolisian diarahkan untuk menditeksi (menemukan) hal-hal yang bertalian dengan pelanggaran hukum dan kerawanan-kerawanan Kamtibmas, sehingga kerawanan-kerawanan Kamtibmas baik yang berupa faktor-faktor korelatif kriminogen, Police Hazard maupun ancaman faktual berupa peristiwa-peristiwa gangguan Kamtibmas/kriminalitas benar-benar dapat dideteksi (ditemukan) dan selanjutnya diidentifikasi (dikenali) serta dinilai (assesment).

Hasil diteksi, identifikasi dan assesment Intelpampol, di dalam rangka Manajemen Operasional khususnya, menjadi bahan masukan

bagi proses perencanaan. Di dalam operasi rutin produk tersebut dapat berupa perkiraan Intel periodik dan di dalam operasi khusus dapat berupa perkiraan Intel khusus, sedangkan untuk tingkat Polsek cukup dijadikan bahan bagi penilaian kerawanan daerah yang diolah bersama hasil ditekisi berbagai kegiatan masyarakat, dijadikan sasaran selektif Polsek.

Dalam kaitan ditekisi dan aksi/cara bertindak, maka hasil ditekisi yang baik akan sangat menentukan aksi/cara bertindak dan penyusunan kekuatan yang tepat. Demikian juga dikaitkan dengan strategi penangkalan/pencegahan, di mana upaya pencegahan lebih diutamakan dari pada upaya penindakan; maka arti ditekisi menjadi posisi yang leading di dalam gerak Operasional maupun Pembinaan Polri; dan sehubungan dengan hal ini di dalam strategi optimasi dan dinamisasi, Kapolri menginginkan agar fungsi Intelijen Kepolisian menjadi "pushing power" bagi fungsi-fungsi lainnya.

Di dalam sistem Operasional Kepolisian yang diintrodusir pada sekitar tahun 1973, digambarkannya hubungan fungsi Intelijen dengan fungsi-fungsi Operasional lainnya seperti gelandang tengah dengan para penyerang depan di dalam satu tim kesebelasan sepak bola.

Dari uraian di atas, jelas betapa fungsi Intelpampol dengan ditekisi dininya menduduki "Posisi Penga-

rah" di dalam dinamika operasional bahkan juga pembinaan Polri.

Bagaimana posturnya dimasa datang?

Berbicara tentang postur ditekisi dini dimasa datang, tentu tidak bisa terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi Polri dimasa datang; baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.

Dalam pembahasan ini, penulis membatasi hanya yang bertalian dengan bidang operasional. Di bidang operasional, sesuai dengan ketentuan yang ada; Polri sebagai kekuatan Hankam bertugas sebagai alat negara penegak hukum dan sebagai inti pembina Kamtibmas.

Baik di dalam penegakan hukum maupun di dalam pembinaan Kamtibmas, masalah yang dihadapi Polri dimasa datang akan semakin kompleks dan berat, hal tersebut sejalan dengan berbagai faktor lingkungan strategik yang mempengaruhinya.

Betapa berbagai akibat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan masyarakat yang semakin canggih, aspirasi/kepentingan masyarakat yang semakin meningkat; bentuk dan jenis kriminalitas semakin bervariasi; baik modus operandi, alat yang digunakan, sasaran/korban, motif, maupun waktu dan tempat kejadian.

Demikianlah memang adanya, sebab seperti telah kita fahami bersama bahwa "Crime is the shadow of the civilization" (Kejahatan adalah bayang-bayang dari suatu peradaban manusia).

Oleh karenanya kemampuan diteksi dini di dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan, jelas harus dipacu untuk terus ditingkatkan sejalan dengan kemajuan dari berbagai jenis kejahatan tersebut.

Demikian juga kemampuan diteksi di dalam rangka menjamin stabilisator keamanan dan ketertiban masyarakat guna terwujudnya stabilitas Hankam dan stabilitas nasional untuk menunjang Pembangunan Nasional; mutlak perlu ditingkatkan.

Dapat dibayangkan betapa Polri akan selalu ketinggalan dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat yang begitu cepat, apabila kemampuan diteksi dini tidak ditingkatkan dan dimantapkan di dalam masyarakat yang sedang membangun seperti yang dialami Bangsa Indonesia ini, perubahan yang terjadi di masyarakat memang begitu cepat; sehingga tidak sedikit dampak sampingan timbul yang merupakan baik residu-residu dihilir maupun residu di tingkat hulu sendiri, sebagai akibat berbagai kebijaksanaan yang diambil ditingkat supra struktur. Memang pembangunan yang pada hakekatnya mengadakan perubahan-perubahan, menimbulkan dinamika masyarakat yang tidak selalu bergerak kearah gerak sosial yang asosiatif saja, tetapi juga bergerak kearah gerak sosial yang bersifat disosiatif.

Lebih-lebih pada periode pembangunan Bangsa Indonesia yang akan

datang, di mana pada Pelita VI telah ditetapkan sebagai tahap dimulai tinggal landas pembangunan Bangsa Indonesia, yang antara lain ditandai dengan pembangunan di sektor Industri yang semakin meningkat; betapa rawan keadaan saat itu, di mana nilai-nilai masyarakat Indonesia yang semula lebih bersifat agraris akan dibawa ke-nilai-nilai masyarakat industri.

Contoh-contoh berikut adalah ilustrasi dampak-dampak sampingan sebagai residu dari upaya-upaya di bidang pembangunan.

Program Listrik Masuk Desa, jelas telah banyak meningkatkan kehidupan masyarakat baik dilihat dari aspek ekonomi maupun pendidikan, berbagai kegiatan industri kecil muncul di tengah-tengah masyarakat yang telah berhasil menambah penghasilan masyarakat di pedesaan. Demikian juga dari aspek pendidikan telah membawa kemajuan dengan tersedianya penerangan, anak-anak sekolah di pedesaan telah belajar lebih baik lagi.

Akan tetapi di samping hal-hal yang bersifat positif seperti diuraikan di atas, juga telah timbul dampak-dampak negatif; antara lain masuknya nilai-nilai budaya baru di tengah masyarakat desa sebagai akibat pengaruh nilai-nilai/budaya yang dilihat melalui media TV yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai sebelumnya; seperti sifat-sifat konsumtif, pergaulan muda-mudi yang meniru pergaulan muda-mudi perkotaan.

Selanjutnya dari kebijaksanaan supra struktur yang tidak mengadakan pembatasan terhadap produksi kendaraan bermotor; telah menimbulkan permasalahan di bidang keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas di tengah-tengah masyarakat. Puluhan jiwa melayang setiap hari di seluruh tanah air sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas di jalan-jalan; demikian juga ketidak tertiban dan ketidak lancar-an/kemacetan lalu-lintas menjadi pemandangan sehari-hari, terutama di kota-kota besar.

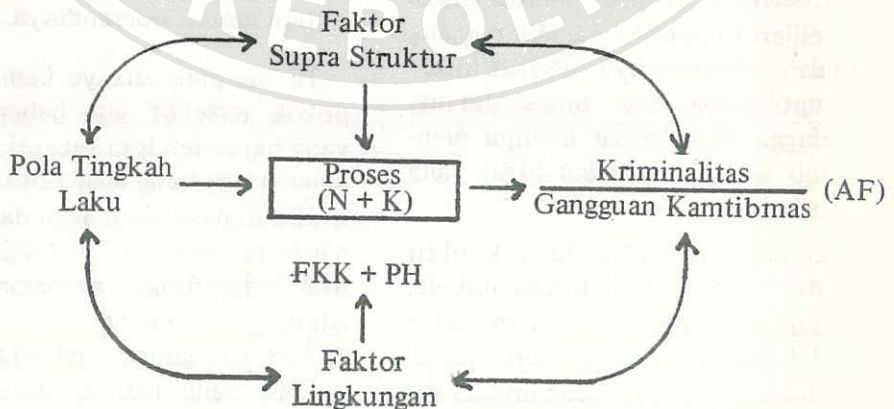
Hal tersebut terjadi di samping karena faktor manusianya, juga sarana jalan serta sarana penunjang guna menjamin keamanan/keselamatan berlalu-lintas masih sangat terbatas.

Dari uraian di atas, jelas betapa tantangan yang dihadapi Polri dari hari ke hari terus meningkat dan semakin kompleks.

Tantangan tersebut secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut:

- Tantangan situasional, yaitu perkembangan kriminalitas dan faktor-faktor korelatif kriminogen berupa kerawanan-kerawanan di bidang Ipoleksosbud Hankam.
- Tantangan instrumental, yaitu perkembangan yang bertalian dengan dampak yang ditimbulkan dari hal-hal yang terjadi di tingkat supra struktur (yang terakhir sehubungan dengan adanya Keppres 29 Tahun 1988 tentang Bakorstanas di mana Polri dikedepankan di dalam upaya memelihara stabilitas).
- Tantangan penampilan, yaitu peningkatan perwujudan penampilan Polri yang tercermin dalam peningkatan kemampuan teknis Profesional dan pelayanan Polri kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di bidang Kamtibmas.

Secara skematis uraian di atas, yaitu penanggulangan kriminalitas/gangguan Kamtibmas dengan pendekatan kesistemanian dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan memperhatikan gelagat/trend perkembangan seperti diuraikan di atas, maka memperkuat keharusan kemampuan diteksi dini ditingkatkan secara konseptual, terarah dan berlanjut; serta di dalam hal tertentu perlu diadakan langkah-langkah terobosan guna mempercepat kemampuan yang semakin meningkat. Petunjuk Kapolri di dalam strategi optimasi dan dinamisasi, tentang diteksi dini antara lain menetapkan agar pada tahap akselerasi diadakan analisis-analisis terhadap resiko kegagalan di bidang diteksi, selanjutnya pada tahap intensifikasi diadakan evaluasi terhadap kemampuan diteksi yang dicapai di dalam periode Renstra III Hankam/ABRI guna dimantapkan di dalam periode Renstra IV; sedangkan untuk tahap pemantapan diharapkan tercipta kemampuan diteksi dini dengan profesionalisme intelijen yang tinggi.

Selanjutnya dari "Konsepsi pembenahan dan pembangunan Intelijen Kepolisian", dirumuskan sebagai berikut: "Tujuan pembangunan Intelijen Kepolisian jangka panjang adalah terwujudnya Postur Intelpampol yang ideal dimasa datang, sehingga benar-benar mampu menjawab setiap tantangan tugas yang dihadapi".

Guna merumuskan lebih konkrit postur diteksi dini dimasa datang, sesuai dengan uraian-uraian terdahulu; menurut pendapat penulis harus memiliki kemampuan-ke-

mampuan pokok sebagai berikut:

1. Segala aspek gatra, baik Tri gatra alami ataupun Panca gatra sosial, harus mampu diamati/dikuti perkembangannya oleh fungsi Intelpampol, utamanya untuk mampu menditeksi (menemukan) faktor-faktor korelatif kriminogen dan Police Hazard. Selanjutnya juga harus mampu mengidentifikasikannya (menenalinya) serta menilainya (assessment); sehingga setiap saat, masyarakat disuatu tempat/daerah suatu satuan kewilayahan Polri mampu dinilai kerawanan dan karakteristiknya dari segi Kamtibmas.
2. Terhadap berbagai peristiwa Kamtibmas/kriminalitas, khususnya yang intensitas dan frekuensinya tinggi serta mempunyai jaringan, dengan segala motif dan latar belakangnya harus mampu diditek (ditemukan) dan diidentifikasi (dikenali) serta didokumentasikan dengan baik yang bertalian dengan bio data lengkap pelakunya, anatominya maupun modus operandinya.

Di samping adanya kemampuan pokok tersebut, ada beberapa hal yang harus tercipta sebagai kemampuan pendukung agar postur diteksi dini dimasa yang akan datang benar-benar menjadi "pushing power" bagi fungsi-fungsi operasional Polri lainnya, antara lain:

1. Terselenggaranya jalur/jaring diteksi yang mantap antara ting-

kat/eseelon/lapis-lapis satuan kewilayahan Polri, sehingga azas "early warning dan early detection" benar-benar jadi kenyataan (skema terlampir).

2. Keterpaduan antara fungsi-fungsi operasional benar-benar terwujud pada setiap tingkat satuan kewilayahan Polri dari mulai tingkat Polsek sampai ke Mabes Polri (skema keterpaduan tingkat Polsek dan Polres ke atas terlampir).
3. Kemampuan membina dan menggunakan jaringan di bawah permukaan.

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN DITEKSI DI POLDA JATENG

Kalau di dalam uraian terdahulu digambarkan bagaimana diteksi dini menjadi "Posisi pengarah" di dalam dinamika operasional dan pembinaan Polri, maka hakekat pembenahan dan pembangunan Intelijen Kepolisian adalah upaya peningkatan kemampuan diteksi.

Hal tersebut secara konsepsional dan berlanjut harus diwujudkan oleh kesatuan-kesatuan kewilayahan, sekaligus sebagai penjabaran dari strategi optimasi dan dinamisasi Polri, khususnya di bidang operasional. Peningkatan kemampuan diteksi dini fungsi Intelijen Kepolisian dimulai dan diutamakan di tingkat Polsek; hal itu dilakukan sejalan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di dalam "konsepsi pem-

benahan dan pembangunan Intelijen Kepolisian" yaitu yang menetapkan bahwa Polsek merupakan "Lini I"/Basis diteksi di dalam rangka jaringan/rantai diteksi Intelijen Kepolisian.

Kebijaksanaan tersebut sejalan pula dengan kebijaksanaan Polri yang menetapkan Polsek sebagai basis pembinaan Kamtibmas atau ujung tombak dari satuan-satuan kewilayahan Polri di dalam rangka melaksanakan missinya di tengah-tengah masyarakat.

Untuk tercapainya hal tersebut, di samping kepada seluruh jajaran Polsek perlu diberikan pedoman umum bagaimana pelaksanaan fungsi intelpam ditingkat Polsek, juga Polsek-polsek harus dibina (antara lain melalui latihan-latihan berlanjut) agar secara cermat dan lengkap mampu menditeksi kerawanan-kerawanan Kamtibmas, baik berupa faktor-faktor korelatif kriminogen dari segala aspek gatra Polsek, demikian juga Police Hazard serta berbagai jenis ancaman faktual yang terjadi baik dalam bentuk kriminalitas maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Dari hasil diteksi kerawanan-kerawanan Kamtibmas tersebut, Polsek secara sederhana diberi pedoman dan dilatih untuk mampu menganalisis kerawanan daerahnya; yang pada garis besarnya digolongkan kepada 3 (tiga) klasifikasi yaitu sangat rawan, rawan dan kurang rawan.

Selanjutnya Polsek-Polsek juga

telah diberi pedoman dan dilatih untuk mampu mendeteksi berbagai kegiatan masyarakat baik yang bersifat daur maupun insidentil dan dislah menjadi kalender Kamtibmas maupun kegiatan secara insidentil. Dari kemampuan Polsek menganalisis kerawanan daerahnya dan hasil deteksi kegiatan masyarakat, Polsek dapat membuat konsep operasional bulanan serta menetapkan sasaran-sasaran selektif mingguan maupun harian, yang selanjutnya mampu menyiapkan rencana kegiatan mingguan maupun harian.

Sebagai upaya terobosan, di dalam rangka memantapkan Polsek sebagai basis deteksi, di jajaran Polda Jateng setiap 6 (enam) bulan sekali diselenggarakan lomba Polsek sebagai basis deteksi.

Di tingkat Polres/Polresta/Poltabes sebagai "Lini II" di dalam jaringan deteksi Intelijen Kepolisian, satuan tersebut dijadikan basis operasional, di mana operasi-operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dapat dilaksanakan oleh Unit-unit Intel yang telah dibentuk.

Operasi-operasi Intelijen oleh Unit-unit Intel, dilaksanakan di dalam operasi-operasi rutin (Service type of operation = STO) yang utamanya melalui hasil deteksi Polsek dan di dalam rangka pelaksanaan program kerja satuan tersebut; serta di dalam operasi-operasi khusus Intelijen (mission type operation MTO). Agar produk-produk Inteli-

jen dari Polres/Polresta/Poltabes memiliki bobot analisis yang memadai serta agar tercapai penyelenggaraan filling dan recording serta pendokumentasian yang tertib, harus diupayakan penataran administrasi Intel bagi personil satuan Intel Polres/Polresta/Poltabes. Di dalam upaya peningkatan kemampuan pengungkapan berbagai jenis kriminalitas/gangguan Kamtibmas, keterpaduan dengan fungsi Reserse sangat ditekankan, sehingga diharapkan peristiwa yang terjadi mampu dideteksi bio data para pelakunya, modus operandinya, anatominya maupun motif dan latar belakangnya. Selanjutnya Kasat Intelpam Polres/Polresta/Poltabes diarahkan untuk secara terbatas mampu membina fungsi Intelpam di jajarannya.

Di tingkat Polwil dan Polda masing-masing sebagai "Lini III" dan "Lini IV" kemampuannya diarahkan guna mempertajam analisis produk-produk Intelijen serta penyelenggaraan filling dan recording yang tertib. Selanjutnya fungsi Intelpampol di tingkat Polwil dan Polda terutama diarahkan untuk mampu membina fungsi di jajarannya; sedangkan yang bersifat operasional terutama di dalam rangka memberi back up atau bantuan teknis kepada Polres/Polresta/Poltabes.

Guna terjaminnya pelaksanaan fungsi Intelpampol dengan baik, kepada setiap tingkat/eselon satuan

kewilayahan di jajaran Polda Jateng telah diberi pedoman yang standard untuk tersedianya berbagai piranti lunak.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEM-PENGARUHI

Dilihat dari periode pembenahan Polri, khususnya bagi fungsi Intel-pampol setelah dirumuskannya "konsepsi pembenahan dan pembanguan Intelijen Kepolisian" yaitu pada tahun 1980; waktu tersebut relatif cukup lama. Namun jika dilihat kepada kemampuan yang telah berhasil dibangun hingga saat ini, khususnya peran Intelpampol di dalam diteksi dini, sungguh masih jauh dari memadai.

Berbagai hal memang telah mem-pengaruhi, sehingga hasil tersebut jauh dari memadai; di samping ada beberapa hal yang mempunyai pe-ngaruh yang bersifat positif/meng-untungkan.

Pengaruh-pengaruh yang negatif/tidak menguntungkan dan bersifat menghambat di dalam mencapai hasil yang diharapkan antara lain:

— Belum terdapatnya persepsi yang sama tentang fungsi, tugas pokok maupun peranan Intelpampol di kalangan tubuh Polri sendiri. Jangankan secara menyeluruh di-segenap Perwira Polri; dikalangan Perwira menengah atau bahkan dikalangan para kepala kesatuan kewilayahan sebagai pengguna Intelijen; pemahaman tentang hal tersebut masih belum

terdapat persepsi yang sama.

— "Konsepsi pembenahan dan pembangunan Intelijen Kepolisian", belum sepenuhnya dikuasai oleh para pembina fungsi Intelpampol, sebagai akibat pembinaan personil Polri yang masih terlihat kurang mantap. Pembinaan karier di dalam sistem pembinaan personil Polri belum bisa menjamin seorang Perwira menjadi profesional disuatu bidang/fungsi tertentu.

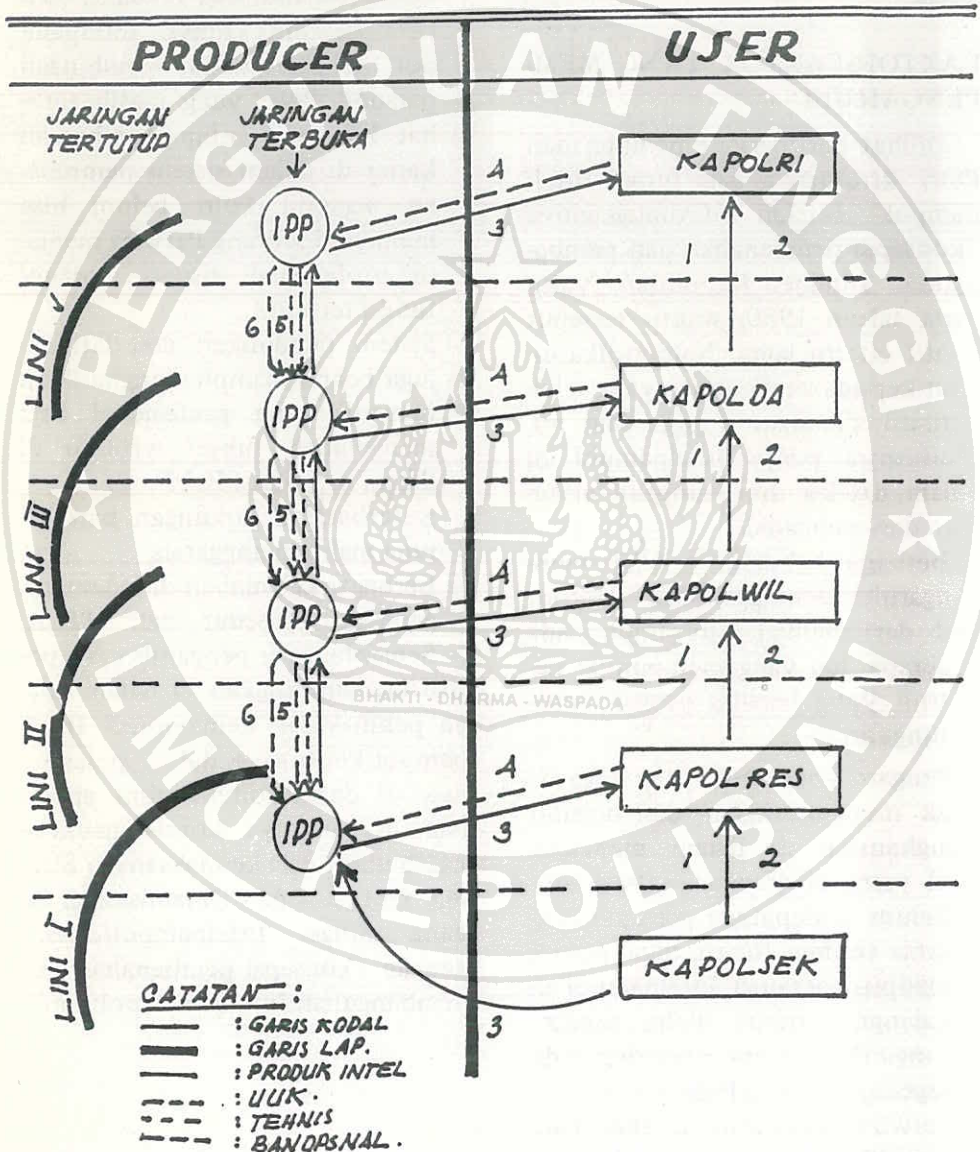
— Sistem pendidikan dan latihan, juga belum mampu menghasilkan personil yang profesional bagi mengemban fungsi tertentu di dalam organisasi Polri.

— Keterbatasan dukungan baik sarana maupun anggaran.

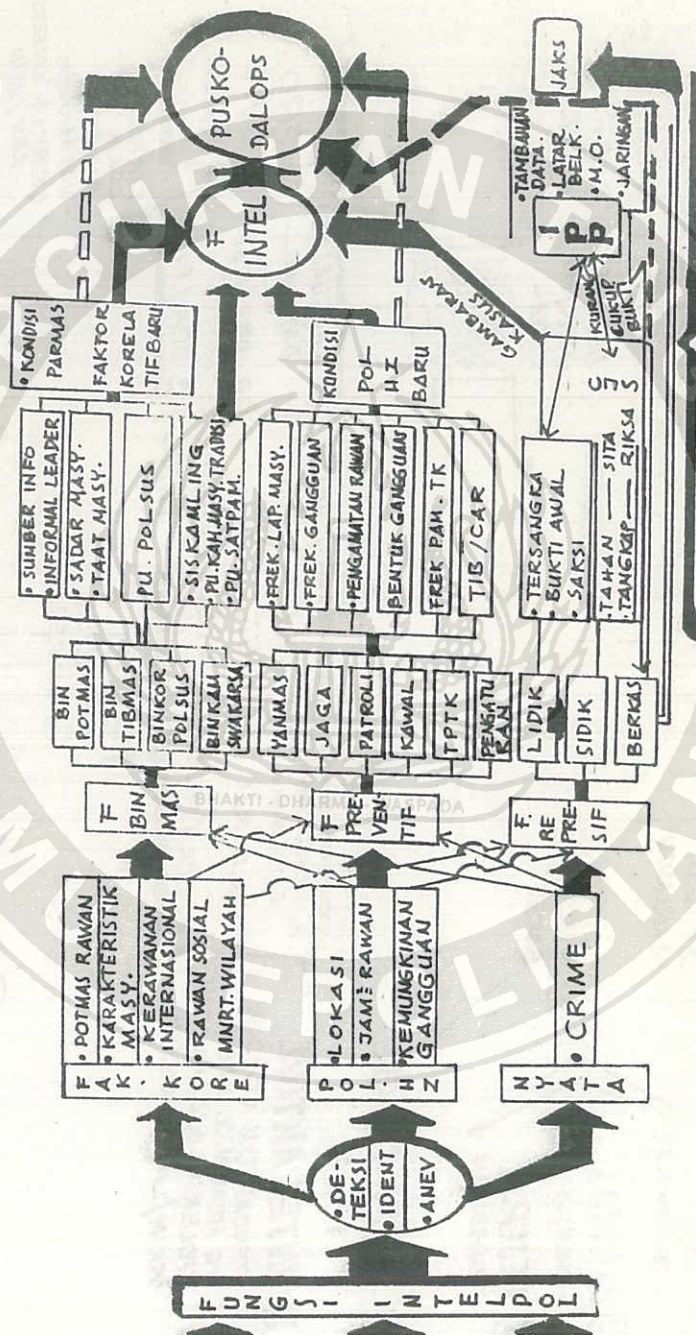
— Berbagai kelemahan di bidang organisasi, prosedur dan HTCK.

Sementara itu pengaruh yang positif/menguntungkan di dalam upaya peningkatan kemampuan Intelpampol/khususnya dalam peranannya di dalam diteksi dini antara lain, terdapatnya konsistensi/kesinambungan dari kebijaksanaan Strategi Optimasi dan Dinamisasi di bidang fungsi Intelpampol/diteksi dengan "konsepsi pembenahan dan pembangunan Intelijen Kepolisian".

MEKANISME KERUCUT JARINGAN INTELPOL



Mekanisme Keterpaduan f. Intel dg. f. Operasional lainnya



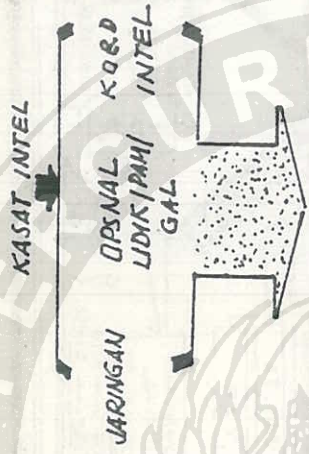
KOMUNIKASI INTENSIF ANTAR FUNGSI
 C TERUS - MENERUS, PERIODIK SESUAI KEBUTUHAN

- ① SABHARA
 - PATROLI
 - PENGAWALAN
- ② BINMAS
 - KOMSOS
- ③ RESEJRSE
 - PENYIDIKAN

POLSEK

- ① JARINGAN PEMBANTU
- ② PULBAKET

POLRES



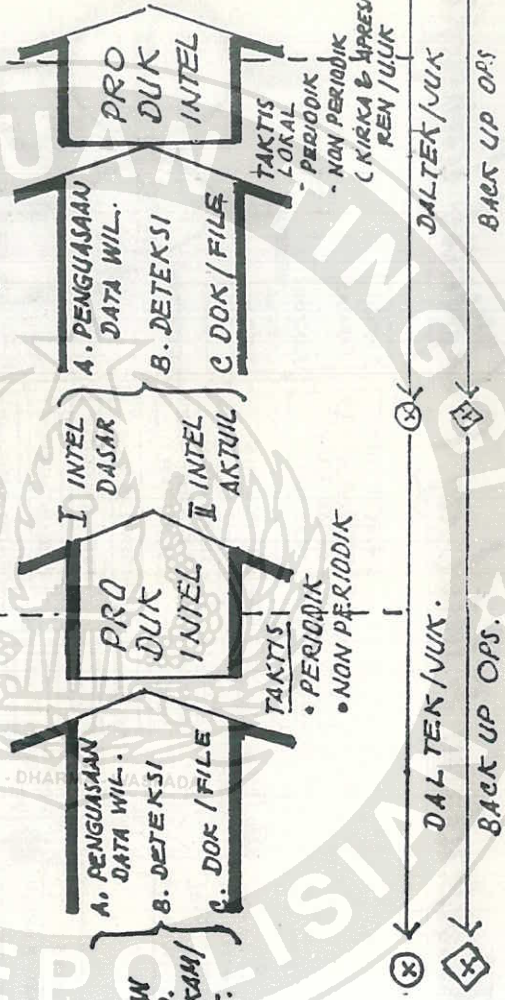
KA POLRES

I. INTEL DASAR

1 1/2 a 6

II. INTEL AKTUAL

PENCATATAN KEJADIAN YG MENONJOL DIBID. IPOLEKSOS BUD/ HANKAM/ KRIM/LINGKUNGAN.



LINTASAN PERISTIWA



Pangab Jenderal TNI Tri Sutrisno menyematkan Bintang Bhayangkara Utama kepada Kepala Kepolisian Thailand Jenderal Polisi Pow Sarasin atas jasanya dalam mempererat hubungan dan mengembangkan kerja sama antara Pemerintah Thailand dengan Pemerintah Indonesia, khususnya antara Royal Thai Police dengan Polri.



Jenderal Polisi Drs. Moch. Sanoesi dan Jenderal Polisi Sarasin saling bertukar cendera mata dalam salah satu rangkaian acara kunjungan Kepala Kepolisian Thailand di Indonesia pada bulan Mei 1989 yang lalu.